



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKIM SUPANDI
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 723817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.589.788.000**

1. Tanah Seluas 744 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 47.616.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/300 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 131.912.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIREBON , HASIL SENDIRI Rp. 12.690.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 302.860.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
6. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 33.950.000
7. Tanah Seluas 1570 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 100.480.000
8. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 11.480.000
9. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 23.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **18.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FREE GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.



15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 165.403.467

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.788.191.467

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.788.191.467

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.